

Tragedi Mei 1998: Bara Krisis Moneter, Api Sentimen Rasial, dan Jejak Reformasi yang Terbakar

**Muhammad Ijlat Aziz¹, Jidan Mildan²,
Muhammad Wifqil Hikam³, Ahmad Maftuh Sujana⁴.**

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia
Email: ijlalaziz08@gmail.com¹, zidanmldn13@gmail.com²,
Muhammadwifqil13@gmail.com³, maftuhsujana@gmail.com⁴.

Abstrak

Jakarta sebagai jantung Indonesia, menjadi saksi bisu trauma mendalam akibat peristiwa berdarah Mei 1998. Krisis moneter yang melanda Asia, memicu ketidakpuasan meluas terhadap pemerintahan Orde Baru dan berujung pada kerusuhan, penjarahan, serta kekerasan yang meninggalkan bekas luka mendalam pada masyarakat, khususnya etnis Tionghoa. Penulisan ini menganalisis penyelesaian sosial, politik, dan ekonomi dari insiden tersebut, serta mengkaji upaya penyembuhan luka kolektif yang dilakukan oleh beberapa warga Jakarta. Metode analisis berupa kajian terhadap rangkaian peristiwa, pola penyebaran kerusuhan, peran provokator, serta respons aparat keamanan, juga meninjau implikasi pasca-kerusuhan terhadap reformasi politik dan ekonomi di Indonesia. Peristiwa Mei 1998 merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia, mengakhiri pemerintahan otoriter dan membuka jalan bagi demokratisasi serta perubahan sosial-politik yang mendalam.

Kata Kunci: Lokasi, Jakarta, Mahasiswa, Rakyat

Pendahuluan

Peristiwa Mei 1998 merupakan salah satu momen krusial dalam sejarah modern Indonesia yang menandai runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi. Tragedi ini berakar pada krisis moneter yang melanda Asia dan dunia, mengakibatkan kemerosotan nilai tukar rupiah, lonjakan harga bahan pokok, serta peningkatan jumlah impor, yang secara signifikan memperburuk kondisi ekonomi, politik, dan pemerintahan di Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat semakin meluas akibat ketidakadilan sosial, pemerintahan yang otoriter, dan tuduhan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi (Susan, 2011).

Puncak ketegangan terjadi pada 12-13 Mei 1998 dengan meletusnya demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di berbagai kota, khususnya Jakarta, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda.



Peristiwa ini juga diwarnai dengan kekerasan etnis yang menyasar kelompok Tionghoa, memperparah trauma kolektif bangsa. Sentimen anti-Tionghoa ini, yang telah ada jauh sebelum kedatangan Belanda dan diperparah oleh perlakuan istimewa terhadap etnis Tionghoa sebagai rekan bisnis di masa lalu, mencapai puncaknya pada Mei 1998. Penembakan brutal empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi pemicu utama kerusuhan yang menyebar luas.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penyelesaian sosial, politik, dan ekonomi dari peristiwa Mei 1998, serta mengidentifikasi upaya-upaya penyembuhan luka kolektif yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Kajian ini akan menyoroti bagaimana pola kerusuhan, yang seringkali dimulai berdekatan dengan aksi mahasiswa namun kemudian dimanfaatkan oleh kelompok provokator, menunjukkan adanya perencanaan di balik kejadian tersebut. Selain itu, akan dibahas pula peran aparat keamanan yang pada awalnya tampak kewalahan dan tidak terlihat melakukan langkah antisipasi yang memadai (Rinaldo, 2022).

Lebih lanjut, tulisan ini akan mengkaji dampak langsung dari peristiwa tersebut, termasuk bagaimana isu-isu rasial dan politik dimanfaatkan untuk memicu kekerasan, serta bagaimana masyarakat bereaksi terhadap situasi mencekam tersebut, termasuk inisiatif penjagaan lingkungan. Melalui studi kepustakaan yang mendalam dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), serta gagasan kritis konseptual mengenai transisi politik dan rekonsiliasi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai kompleksitas Tragedi Mei 1998.

Analisis ini juga akan mempertimbangkan bagaimana pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 membuka jalan bagi era Reformasi, dengan perubahan signifikan dalam sistem politik dan upaya pemulihan ekonomi di bawah pemerintahan B.J. Habibie, termasuk deregulasi, rekapitalisasi perbankan, dan pelegalan serikat buruh independen. Pembebasan narapidana politik dan pengesahan undang-undang tentang

kebebasan berpendapat juga akan dibahas sebagai bagian dari upaya demokratisasi pasca-kerusuhan (Sutradara, 2006).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus historis. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap peristiwa Mei 1998, dengan fokus pada konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi tragedi tersebut, serta upaya penyelesaian dan penyembuhan luka kolektif yang dilakukan. Pola ini relevan untuk memahami kompleksitas peristiwa yang memiliki banyak dimensi dan dampak, serta untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku dan faktor-faktor pemicu (Wijaya et al., 2025).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur. Ini melibatkan pengumpulan, identifikasi, dan analisis informasi dari berbagai dokumen tertulis dan sumber-sumber yang relevan. Data primer seperti laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan peristiwa Mei 1998 dan Data Sekunder seperti Buku dan Jurnal Ilmiah yang membahas krisis moneter, runtuhnya Orde Baru, kerusuhan Mei 1998, dan era Reformasi.

Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif, yang meliputi narasi deskriptif, kronologi peristiwa, analisis sentimen (terhadap etnis Tionghoa, reformasi, dll) interpretasi dampak sosial-politik dari kerusuhan dan data konseptual berupa kajian teori mengenai transisi demokrasi, krisis ekonomi, konflik sosial, dan rekonsiliasi pasca-konflik (Braun & Clarke, 2006).

Data akan disajikan secara deskriptif-analitis. Ini berarti data akan dipaparkan dalam bentuk narasi yang sistematis, diikuti dengan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, dan implikasi dari peristiwa yang terjadi. Penyajian data akan meliputi urutan kejadian, seperti kronologi tragedi Trisakti dan kerusuhan di berbagai lokasi di Jakarta, mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti sentimen rasial, peran provokator, respons aparat keamanan, dampak sosial-ekonomi, memberikan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan,

menghubungkan data dengan teori yang relevan dan menawarkan gagasan kritis mengenai penyelesaian dan penyembuhan luka kolektif.

Pembahasan/Hasil

A. Latar Belakang Pemicu Kerusuhan Mei 1998

Krisis moneter yang dimulai pada Juli 1997 telah berdampak luas pada perekonomian Indonesia selama hampir dua tahun, menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan pengangguran meningkat drastis. Situasi ini diperburuk oleh berbagai bencana alam dan sosial, seperti gagal panen akibat kekeringan ekstrem, wabah hama, kebakaran hutan di Kalimantan, dan kerusuhan di berbagai kota pada Mei 1998, termasuk insiden yang dipicu oleh sentimen anti-Tionghoa.

Menanggapi krisis moneter, Bank Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar rupiah yang mengambang bebas terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, pada Agustus 1997, mengakhiri sistem managed floating yang sebelumnya berlaku. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh drastis dari sekitar Rp 2.450 per dolar AS pada Juni 1997 menjadi Rp 13.513 pada akhir Januari 1998, meskipun sempat mengalami penguatan di kemudian hari (Tarmidi, 2003).

Asim Gunawan menyatakan bahwa generasi muda etnis Tionghoa cenderung tidak merasa istilah “Cina” sebagai peyorasi, berbeda dengan generasi tua yang menganggapnya negatif dan lebih suka disebut “Tionghoa”. Bagi sebagian orang, kedua istilah ini tidak memiliki konotasi berbeda, namun bagi sebagian lain, perbedaannya sangat signifikan. Ada yang berpendapat istilah “Cina” sangat merendahkan, sementara yang lain tidak menganggapnya demikian (Sia, 2005).

Kerusuhan tersebut ditandai oleh tindakan-tindakan rasial yang meluas, mulai dari ujaran kebencian hingga kekerasan fisik yang brutal, termasuk perusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Sasaran utama tindakan-tindakan ini adalah warga keturunan Tionghoa, dengan pelaku kerusuhan seringkali menggunakan sentimen anti-Tionghoa untuk menghasut massa. Simbol-

simbol identitas etnis dan agama, seperti “Pribumi,” “Muslim,” dan “Haji,” serta slogan-slogan politik seperti “Pro Reformasi,” digunakan untuk mengidentifikasi dan menargetkan kelompok tertentu. Beberapa pesan yang disampaikan sangat eksplisit, seperti contoh spanduk yang menyerukan pembakaran dan penghancuran warga Tionghoa (Hikmawati, 2017).

Berita menyebar bahwa sejumlah area bisnis dan permukiman etnis Tionghoa menjadi sasaran kerusuhan parah; pembakaran, penjarahan, dan penganiayaan terjadi tanpa bantuan aparat keamanan, meskipun warga berulang kali menelepon dan memanggil mereka. Bahkan, aparat yang terlihat di lokasi hanya mengawasi dan tidak melakukan apa pun untuk mencegah atau menghentikan kejahatan. Seolah-olah sudah mengetahui yang akan terjadi, beberapa toko, kantor, dan rumah memasang sajadah atau papan bertuliskan “milik pribumi” dan “milik muslim” di depan pintu mereka. Bangunan di sekitar yang tidak melakukan hal serupa hancur dan penghuninya melarikan diri atau dianiaya jika tidak sempat melarikan diri (Ester, 1998).

Kekerasan ini semakin mengerikan, dengan mal-mal yang memiliki toko milik etnis Tionghoa juga dibakar, seperti Yogya Plaza Klender di Jakarta Timur. Sebelum dibakar, individu tak dikenal meneriakkan yel-yel kebencian terhadap etnis Tionghoa, menghasut kerumunan untuk menjarah. Saat massa masih di dalam, mal dibakar, menyebabkan banyak korban jiwa bukan hanya dari etnis Tionghoa, termasuk anak-anak dan remaja yang terkurung bersama orang dewasa. Banyak mayat tidak dapat dikenali dan dimakamkan secara massal, dan banyak pula yang hilang tanpa jejak. Situasi ini berlanjut selama dua hari berikutnya.

Warga etnis Tionghoa yang mampu menghindari kota-kota di Jawa dan Sumatera menjual barang-barang mereka dan meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman. Beberapa pindah ke hotel, ada yang ke Bali, atau ke luar negeri seperti Singapura dan Australia. Namun, ini tidak tanpa kendala; di Jakarta, kendaraan menuju Bandara Soekarno Hatta dicegat oleh orang bersenjata, dan warga etnis Tionghoa dirampok bahkan dianiaya di tempat, disaksikan oleh banyak orang asing yang juga

sedang keluar. Mereka kemudian menceritakan peristiwa mengejutkan ini kepada media di negara masing-masing.

Di tengah kekacauan politik, peristiwa keji yang terjadi selama kerusuhan, seperti kerusakan, penghancuran, penjarahan, dan penganiayaan di kawasan etnis Tionghoa di Jakarta pada 13 hingga 15 Mei, luput dari pemberitaan media nasional. Namun, warga yang menyaksikannya tetap membicarakannya, hingga akhirnya para aktivis sosial dari lembaga swadaya masyarakat mulai menyelidikinya. Meskipun dalam skala yang lebih terbatas, munculnya simbol-simbol politik seperti “Pro Reformasi” dan “Anti Soeharto” di beberapa lokasi mengindikasikan usaha untuk menghubungkan kerusuhan dengan agenda politik tertentu. Di sejumlah tempat, teramati aktivitas yang menyerupai demonstrasi mahasiswa yang tengah marak terjadi (Dewi, 2014).

B. Kronologi Peristiwa Kerusuhan di Jakarta

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengidentifikasi serangkaian kejadian sebelum dan selama kerusuhan 13-15 Mei di Jakarta. Dua insiden yang paling terkait erat dengan kerusuhan tersebut adalah penembakan dan pemakaman mahasiswa Trisakti pada 12 dan 13 Mei 1998. Tragedi Trisakti memicu atmosfer kerusuhan dan menjadi isu sentral yang memobilisasi massa besar. Analisis ini didasarkan pada peningkatan demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu reformasi, berbarengan dengan memuncaknya krisis ekonomi. AksiMeningkatnya demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia telah mengakibatkan peningkatan tensi politik, khususnya di Jakarta, dan berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas di beberapa kawasan, termasuk pantai utara Jawa (Ester, 1998).

Sebelum peristiwa berdarah tersebut, Universitas Trisakti relatif tidak aktif dalam kegiatan demonstrasi. Hanya beberapa aksi internal yang pernah dilakukan sebelum demonstrasi besar pertama mereka pada 12 Mei 1998, yang menandai turunnya mahasiswa ke jalan raya untuk pertama kalinya. Berikut ringkasan peristiwa di Trisakti pada tanggal tersebut.

Pada 12 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa Trisakti diawali dengan kegiatan mimbar bebas di area parkir kampus. Setelahnya, mereka bergerak menuju gedung MPR/DPR, namun terhenti sekitar 200 meter dari kampus. Di lokasi dekat kantor lama Walikota Jakarta Barat, mereka dihadang oleh satu peleton Dalmas dari Polres Jakarta Barat. Ketegangan langsung terasa antara mahasiswa dan aparat. Upaya negosiasi melibatkan perwakilan mahasiswa, Dekan Fakultas Hukum Trisakti, Wakapolres, dan Dandim Jakarta Barat, namun demonstrasi tetap berlangsung di Jalan S. Parman. Situasi yang sudah tegang semakin memanas. Ketegangan mencapai puncaknya setelah terjadi insiden saling ejek antara mahasiswa dan seseorang di kerumunan. Beberapa mahasiswa mengejar orang tersebut, yang kemudian lari menuju barisan aparat. Aksi pengejaran ini memicu peningkatan signifikan dalam tensi antara mahasiswa dan aparat keamanan, menandakan potensi bentrokan yang semakin besar. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah yang cukup besar, ditambah dengan ketegangan yang sudah ada, menciptakan situasi yang sangat rawan konflik (Soekisno, 1998).

Mahasiswa mulai meninggalkan lokasi, dan saat mereka mundur, sejumlah polisi terlihat mengeluarkan ejekan dan kata-kata kotor kepada mahasiswa. Aksi ini memancing emosi beberapa mahasiswa untuk menyerang balik aparat, namun berhasil dicegah oleh mahasiswa lainnya. Ketika massa mahasiswa sedang mundur dan sebagian mulai memasuki area kampus, terdengar suara tembakan diikuti penyerangan oleh satuan keamanan yang berjarak sekitar 50 meter dari mahasiswa, dengan pemukulan dan tembakan gas air mata, menyebabkan beberapa korban dari pihak mahasiswa berjatuh.

Aparat keamanan terus menyerang mahasiswa dan warga sipil di sekitar kampus Trisakti, memaksa mereka berlindung di kampus Universitas Tarumanegara dan kantor lama Walikota Jakarta Barat. Serangan tersebut mengakibatkan sejumlah korban luka dan cedera.

Aparat keamanan, baik polisi maupun militer, secara sistematis melakukan pengejaran dan penyerangan terhadap mahasiswa, tidak hanya

di sekitar lokasi demonstrasi awal, tetapi juga meluas ke area kampus Universitas Tarumanegara dan sekitarnya (Citriland, Jalan S. Parman). Penyerangan ini bersifat brutal, melibatkan pemukulan, penganiayaan, penembakan, dan penggunaan gas air mata secara berlebihan. Sasarannya bukan hanya mahasiswa yang terlibat langsung dalam demonstrasi, tetapi juga mahasiswa yang berusaha berlindung di dalam kampus (Soekisno, 1998).

Insiden penembakan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kalangan mahasiswa, selain korban luka akibat kekerasan fisik dan gas air mata. Setelah insiden penembakan, suasana kampus Trisakti menjadi semakin ramai dengan kedatangan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa kampus lain, tokoh masyarakat, wartawan dalam dan luar negeri, serta masyarakat lainnya. Kampus terus ramai hingga malam dan keesokan harinya.

Kerusuhan di Jalan Kyai Tapa terjadi bersamaan dengan demonstrasi mahasiswa di Trisakti. Massa di luar kampus, yang jumlahnya terus bertambah, memulai aksi terpisah, memicu bentrokan dengan aparat dan mengakibatkan pembakaran fasilitas umum di sekitar kampus. Berikut kronologi kejadian di Jalan Kyai Tapa pada 13 dan 14 Mei 1998.

Ribuan orang memadati Jalan Kyai Tapa pada 13 Mei 1998, berkumpul di timur Rumah Sakit Sumber Waras, membentuk kerumunan besar di sepanjang jalan sempit. Massa yang beragam, sebagian mengenakan jaket berwarna cerah, memenuhi area tersebut (Ester, 1998).

Massa bergerak menuju Jalan Kyai Tapa, melewati pos polisi yang dijaga ketat. Sorakan massa memenuhi jalan dari Grogol hingga Tomang Plaza, dengan banyaknya massa yang datang dari arah Roxy Mas, didominasi laki-laki dewasa, dengan sebagian kecil ibu-ibu dan anak-anak.

Pengelola Tomang Plaza menutup seluruh toko dan gerbang sebagai tindakan pencegahan. Kebakaran besar terjadi di dekat Citriland, dan pos polisi di dekat Rumah Sakit Sumber Waras dibakar. Upaya perampokan ATM BNI dan BCA di Tomang Plaza digagalkan, meskipun pasukan keamanan terlihat berjaga di dekat Rumah Sakit Sumber Waras (Ester, 1998).

Pada 14 Mei 1998, beberapa toko di Tomang Plaza telah ditemplei kertas bertuliskan "milik haji" atau "pribumi" pada kaca depan atau *rolling door*. Ribuan massa berkumpul di sekitar Tomang Plaza. Seruan untuk menyerang Tomang Plaza terdengar dari seorang pemimpin massa, sebelum mereka bergerak ke Harmoni, mengumpulkan senjata improvisasi di sepanjang jalan. Meskipun banyak tentara berjaga di Roxy Mas, sebagian massa kembali ke Tomang Plaza, dipimpin tiga pemuda, bersenjatakan besi dan martil, meneriakkan seruan penyerangan.

Upaya pengurus dan satpam mencegah massa memasuki Tomang Plaza gagal. Massa melempari bangunan dengan batu dan bom molotov, merusak pintu gerbang, dan menjarah toko elektronik serta Salon Daniel, membakar barang jarahan di halaman parkir (Ester, 1998).

Ledakan terdengar dari Toko Bond-bond di Tomang Plaza yang sedang terbakar, sebelum massa bergerak ke Rumah Sakit Sumber Waras. Di Jalan Susilo, sekelompok remaja, dipimpin beberapa orang berpakaian mencurigakan, menyerang warga Tionghoa. Seorang korban di dalam mikrolet dirampok dan dipukuli tanpa kehadiran aparat keamanan.

Stasiun televisi menunjukkan Tomang Plaza dan toko-toko di dalamnya telah terbakar. Massa mulai melempari dan menjarah BCA serta Salon Rudy Hadisuwarno yang bersebelahan dengan Rumah Sakit Sumber Waras. Satu mobil kemudian dibakar di halaman belakang salon, tempat rumah makan Padang yang berada di antara BCA dan salon tidak ikut dijarah api yang menjalar dari BCA dan salon terdekat membakar Tomang Plaza, menyebabkan kebakaran besar yang melalap seluruh pertokoan. Jalan Kyai Tapa tampak lengang.

Setelah kerusakan mereda, aparat mengamankan penjarah dan menyuruh massa meninggalkan lokasi. Ketidakhadiran aparat keamanan selama penyerangan ITC Roxy Mas dan Tomang Plaza menjadi sorotan, berbeda dengan tindakan pasca-kerusakan yang meliputi penangkapan dan pengamanan. Gugatan pemilik toko Tomang Plaza terhadap pengelola gedung pun dikabulkan pengadilan. Di Tambora, isu penyerbuan oleh preman berujung pada ronda malam warga (Rahayu, 2024).

Insiden di sekitar kampus Trisakti memicu gelombang kerusakan dan pembakaran yang meluas ke utara Jakarta, berlangsung hingga malam hari. Skala kerusuhan yang hampir merata di Jakarta terlihat jelas dari sebaran geografis kejadian berdasarkan kronologi awal peristiwa, termasuk insiden penembakan.

Kerusuhan Mei 1998 menunjukkan indikasi kuat keterlibatan kelompok provokator di berbagai kota, terjadi atau dimulai bersamaan dengan aksi-aksi mahasiswa, setidaknya di lokasi yang berdekatan dengan tempat mahasiswa beraksi secara politik. Hal ini akhirnya menimbulkan kesan seolah-olah kerusuhan yang terjadi berasal dari aksi mahasiswa, membentuk pola tersendiri.

Kerusuhan di Jakarta, yang berawal di sekitar kampus Trisakti, Grogol, menyebar ke berbagai arah: utara (menuju wilayah tak disebutkan), timur (Jalan Kyai Tapa hingga Jalan Hayam Wuruk), barat (Jalan Daan Mogot hingga Cengkareng), dan selatan (Slipi). Di beberapa lokasi, kerusuhan berlangsung hingga malam hari, umumnya berhenti menjelang malam atau Magrib (H. Agus Rustamana et al., 2023).

Keesokan harinya, titik-titik kerusuhan awal muncul di beberapa lokasi yang berjauhan namun terjadi hampir bersamaan. Kerusuhan meluas ke hampir seluruh Jakarta pada siang hari, setelah meningkat pesat menjelang siang.

Misalnya, Kerusuhan di Jakarta pada 13 Mei 1998 bermula di sekitar kampus Trisakti, Grogol, lalu meluas hingga Pluit. Massa yang mencoba mengajak mahasiswa keluar kampus ditolak, dan setelahnya kerusuhan terjadi di luar kampus, melibatkan kelompok provokator (Ester, 1998).

Pada keesokan harinya, Pada 14 Mei, sejumlah kampus di Jakarta, termasuk IKIP (UNJ), UI, UKI, dan UPN, mengalami insiden serupa. Massa yang datang mencoba mengajak mahasiswa keluar kampus, namun ditolak. Akibatnya, massa, yang diduga termasuk provokator, merusak fasilitas di luar kampus. Laporan lain menyebutkan kejadian serupa di kampus lain, seperti STIE di sekitar Galur, Johar Baru yang melakukan demonstrasi di luar kampus dan berbaur dengan massa. Setelah aksi berlangsung beberapa

lama, dari antara massa mulai melakukan perusakan yang dilanjutkan dengan penjarahan dan pembakaran.

Pada 14 Mei 1998, massa bergerak secara dinamis dari berbagai lokasi. Di beberapa lokasi, ditemukan kelompok-kelompok massa tertentu bahkan lebih siap, yaitu dengan mendatangi lokasi menggunakan kendaraan besar seperti truk. Insiden kerusuhan mulai mereda pada 15 Mei 1998, seiring dengan peningkatan patroli keamanan (Ester, 1998).

C. Peran dan Reaksi Aktor Selama Kerusuhan

Pada 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek menduduki gedung MPR/DPR. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR/DPR Harmoko menyerukan pengunduran diri Presiden Soeharto. Mahasiswa yang menduduki gedung tersebut berasal dari berbagai organisasi, termasuk FKSMJ, Forkot, dan Famred, forum komunikasi mahasiswa se-jabotabek (FKMJ), kesatuan aksi mahasiswa keluarga besar UI, front nasional, dan beberapa kelompok yang lebih kecil mereka datang secara bergelombang, kendaraan yang digunakan tidak terbatas pada bus tetapi juga mobil pribadi masing-masing memakai jaket almamater (Prasisko, 2016).

Pada tingkat forum resmi mahasiswa tampil melalui koordinasi antar senat mahasiswa, namun pada kenyataannya di lapangan mereka mendirikan pula berbagai forum yang sebagian anggotanya adalah mereka juga, sebenarnya mereka ingin menemui ketua MPR atau DPR Harmoko untuk menyampaikan tuntutan reformasi total dan pengunduran diri (Berhenti) Presiden Soeharto melalui sidang istimewa MPR, namun mereka gagal lalu menggelar mimbar bebas. Para mahasiswa tetap menuntut agar reformasi di segala bidang segera dilakukan tuntutan mereka yang paling mendesak adalah meminta agar presiden Soeharto segera meletakkan jabatannya bahkan mereka mengancam tidak akan meninggalkan gedung dewan sebelum ada kepastian pelaksanaan sidang istimewa (Febriyanti, 2016).

Dengan menggelar sejumlah spanduk bertuliskan pesan-pesan seputar reformasi, aksi hari Selasa yang dimulai sejak pagi itu berlangsung tertib, para mahasiswa terus berdatangan secara kelompok dengan menggunakan bus Dan angkutan umum lainnya, aksi demo itu pun melibatkan beberapa LSM, diantaranya Bina Lingkungan Hidup Indonesia (BLHI) dan Solidaritas Wanita Indonesia (SWI), tokoh yang terlihat hadir di antara mahasiswa itu antara lain Adnan Buyung Nasution, ia mengajak mahasiswa agar melakukan aksi secara damai Adnan Buyung mengatakan sebaiknya dalam melakukan aksinya mahasiswa jangan menggunakan kata-kata kasar, para mahasiswa tidak hanya masuk ke gedung dan memenuhi halaman, tetapi naik pula ke atas gedung sambil membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel reformasi. Aswin Ali Nasution wakil ketua bidang kemahasiswaan PP, mengatakan perjuangan mahasiswa dengan reformasi juga didukung PP, “dengan catatan, reformasi yang kita tuju adalah secara konstitusional”, katanya.

Pada pagi harinya hadir Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra dan AM Fatwa memenuhi undangan Komisi II DPR, yang diketuai Budi Harsono, untuk memberikan masukan terkait tuntutan reformasi. Pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pada kesempatan itu Amien Rais menekankan perlunya pergantian pimpinan nasional, selain menuntut presiden mundur para mahasiswa meminta kepada anggota dewan agar tidak meninggalkan gedung DPR sehingga sidang istimewa dapat dilakukan secepatnya, para mahasiswa tampak memblokade jalan keluar, kepada setiap pengendara yang lewat mereka meminta agar dapat menunjukkan kartu identitas mereka, menurut salah seorang mahasiswa hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar anggota dewan tidak keluar (Makka, 2014).

Para mahasiswa, yang mengenakan jaket almamater kampus masing-masing, membawa peralatan untuk keperluan menginap seperti tikar tenda dan pakaian cadangan mahasiswa leluasa masuk berbondong-bondong ke DPR karena memang diberi kesempatan oleh aparat keamanan, menurut Kapendam jaya Letkol Inf. DJ Nachrowi, hal itu terjadi karena ada

penerimaan dari pihak DPR sendiri bagi para mahasiswa, aparat semula sudah mencoba melarang mahasiswa masuk tetapi pihak DPR justru membuka pintu, sementara itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, dalam kesempatan apel cek pasukan di Istora Senayan menilai aksi mahasiswa di gedung MPR atau DPR adalah aksi yang normatif, sepanjang hal itu memenuhi rambu-rambu yang sudah ditentukan, “oleh karena itu, saya himbau kepada para mahasiswa untuk memelihara nama baik lembaga yang sama sama kita cintai itu serta berikanlah hal-hal yang bernilai kepada konstitusi”, katanya.

Pada 20 Mei 1998, akses menuju Lapangan Monas diblokade petugas menggunakan kawat berduri. Namun, Amien Rais kemudian mengimbau massa untuk tidak datang ke Monas dini hari itu, karena khawatir akan terjadi korban jiwa. Sementara itu, ribuan mahasiswa tetap berunjuk rasa di gedung MPR/DPR, mendesak pengunduran diri Soeharto, beberapa hari sebelumnya telah tersiar kabar bahwa bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), peringatannya akan dilaksanakan mahasiswa dan masyarakat dari Jakarta dan luar Jakarta di Monumen Nasional (Monas), salah seorang pelopornya adalah Amien Rais yang telah menulis undangan kepada masyarakat, bahkan publikasi rencana aksi tersebut ada yang melalui surat kabar, acara ini direncanakan akan dihadiri sekitar 1 juta orang (Emita, 2018).

Namun sehari sebelum peringatan harkitnas yang akan digelar di kawasan Monas itu pihak keamanan mengantisipasi dengan memblokade kawasan Monas, akibatnya aksi mimbar bebas di halaman gedung MPR atau DPR makin semarak sedangkan di kawasan lainnya, terutama. sekitar Monas tampak sepi dan benar-benar mencekam, hampir seluruh kawasan Jakarta bagaikan wilayah pasca perang, siapapun yang melewati jalan-jalan di dalam kota Jakarta merasa tidak tenang, lenggang dan mencekam. Di jalan-jalan strategis menuju kawasan sekitar Monas, sejumlah aparat keamanan berdiri di kanan dan kiri panser, lebih dekat dengan kawasan Monas, barikade kawat berduri menutup jalanan, Aparat mengalihkan arus lalu lintas kendaraan dengan memberi isyarat belok ke jalur alternatif.

Beberapa akses jalan menuju Monas, misalnya di sekitar Semanggi, dan Kuningan di blokade sejumlah petugas keamanan dengan kendaraan lapis baja, hal itu berkaitan dengan adanya isu long march para mahasiswa dari gedung DPR ke Monas dan melakukan tabligh akbar di sana. Penjagaan berlapis menuju Monas diperketat hingga radius 1 km, semua kendaraan baik mobil pribadi maupun angkutan umum yang akan menuju ke sana dialihkan ke jalur lain, 4 titik kawasan silang Monas dijaga ketat dengan barikade kawat berduri, begitu pula dengan gang sempit menuju kawasan Monas, perkantoran di sekitar Medan merdeka Barat, Timur, Selatan dan utara sampai tidak ada aktivitas.

Di area taman Monas ratusan aparat keamanan tampak bersiap berjaga puluhan kuda milik pasukan kavaleri disiagakan begitu pula dengan kendaraan lapis baja, suasana lengang pun terjadi di pusat-pusat kota seperti di Grogol Slipi, Tanah Abang, Kebon Sirih, Segitiga Senen, Salemba, Matraman, Menteng, Senayan bahkan jalan tol dalam kota. Suasana serupa meliputi kawasan ring 2 misalnya Kebon Sirih menuju Abdul Muis Kramat Raya jalan jaksa dan sekitarnya area parkir Monas yang biasanya dipundai mobil karyawan kantor Pemda DKI dan kantor lainnya tampak lengang hanya beberapa mobil DLLAJR yang terlihat (Emita, 2018).

Di kawasan Monas hanya kendaraan militer yang mondar-mandir, tidak ada satupun mobil pribadi atau angkutan umum yang terlihat di sana, kawasan Gambir dan sekitarnya sangat sepi karena dijaga aparat keamanan begitu pula jalan Kebon Sirih dan sekitar patung tugu tani yang dijaga 4 panser marinir, dua panser ada di Medan merdeka Timur dan 2 belas Banser di perempatan Setiabudi (Air Mancur), di tugu Monas tampak sebuah helikopter yang senantiasa berjaga, penjagaan ketat terlihat pula di kampus UI Salemba, Pasar Jatinegara dan Kampung Melayu.

Sementara itu di perempatan jalan Hayam Wuruk tampak berjejer 9 panser marinir dan Kodam V Jaya beserta kendaraan ABRI lainnya berdampingan dengan pasokan marinir dan Kostrad yang menjaga lokasi tersebut, sejumlah warga tampak dari jarak sekitar 10 m dari pagar-pagar pembatas. Lalu lintas dialihkan dari jalan utama menuju jalan alternatif atau

jalan lain yang biasanya dipakai dua jalur, di beberapa lokasi tampak jalan-jalan yang di blokade antara lain perempatan Kuningan (dibawah jembatan), jalan kapten Tendean, Gatot Subroto, pintu 1 Senayan menuju jalan Sudirman, Asia Afrika, Tanah Abang 1 dan 2, Suryopranoto dan kesehatan.

Di sepanjang Salemba sejak Selasa malam hingga Rabu pagi setiap gang dijaga 2 pasukan marinir lengkap dengan senjata adapun pertokoan dijaga lebih dari dua pasukan marinir, Pemblokadean terjadi juga di sepanjang jalan menuju Monas, kendaraan dari Kwitang yang menuju Medan Merdeka Timur di blok ada petugas lengkap dengan panser di kawasan tugu tani dan dialihkan ke jalan Menteng Raya, suasana sepi pun terlihat di depan Stasiun Gambir, Stasiun Gambir yang berada di dekat Monas tidak difungsikan tidak ada kereta api yang menaikkan atau menurunkan penumpang, kawasan sentra bisnis dan pemerintahan seperti jalan MH Thamrin, jenderal Sudirman dan Gatot Subroto terlihat kosong, seluruh aktivitas dan perhatian masyarakat pada hari itu hanya tertuju pada satu titik yaitu gedung MPR atau DPR (Makka, 2014).

Jalan Budi kemuliaan (Di belakang gedung Indosat) di blokade petugas, demikian pula jalan Jenderal Sudirman tepatnya di gedung GKBI (seberang kampus Universitas Atmajaya), beberapa dengan pakaian loreng hijau dilengkapi transfer telah berjaga-jaga di depan gedung sehingga kendaraan dari arah Gatot Subroto (gedung MPR atau DPR) tidak dapat lewat. Jalan MH Thamrin di kawasan sogo pundi blokade pasukan barat hijau, kendaraan dari tanah abang yang hendak lewat jalan itu harus mencari jalan lain sementara itu mampu lalu lintas di sepanjang jalan yang di blokade tidak seluruhnya menyala, hanya lampu kuning yang aktif. Demikian juga jalan jalan menuju medan merdeka barat, utara, selatan dan menuju pusat kenegaraan ditutup total adapun lapangan parkir timur senayan yang selama ini menjadi posko komando operasi biaya terlihat sepi karena pasukan disebar atau dialihkan ke tempat-tempat tertentu.

Suasana di wilayah Jakarta timur baik selalu lintas mobil maupun aktivitas masyarakat seolah mati, di tepi jalan terlihat sejumlah pemuda berkelompok ketika di hampiri mereka dengan hati-hati menandakan

identitas orang yang mendekati, kecurigaan sesama warga kini telah merasuki sebagian masyarakat, di kawasan jakarta pusat penjagaan keamanan yang ketat itu tampak di perempatan Senen hingga wawasan MH Thamrin, Jenderal Sudirman dan medan merdeka selatan dengan ditutup nya jalan-jalan itu dengan barik ada kawat berduri, uniknya di tengah suasana mencekam itu selain menjajakan koran sejumlah pedagang asongan di jalanan asia afrika menjajakan bertulisan "Reformasi" (Makka, 2014).

Akibat ditutup nya beberapa kawasan masyarakat yang hendak makan dia mengalami kesulitan tanah kendaraan umum tidak diperbolehkan lewat sehingga menikah harus dari jalan kaki ke kantor masing-masing, bahkan tidak sedikit dari masyarakat dan bekerja kemudian pulang kembali karena alasan suasana mencekam atau karena memang ada penjagaan sehingga mereka enggan berjalan kaki, dengan adanya pembuka dengan dan penjagaan di beberapa kawasan, lalu lintas semua jalanan di jakarta menjadi sepi seperti kendaraan berjalan mulus garis tanpa hambatan, perkantoran pemerintahan atau swasta tidak ada yang beroperasi aktivitas perekonomian dan layanan masyarakat terhenti. Hampir seluruh pusat kegiatan ekonomi seperti bank, supermarket, pasar, sekolahan tutup dan dijaga aparat keamanan seperti di Atrium Senen (Jakarta Pusat) dan kawasan pertokoan Matahari dan Ramayana di Kramat Jati (Jakarta Timur).

Mengenai pengamanan ekstra ketat itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pihaknya mengerahkan setengah kekuatan dari personel Garnisun Jakarta yang jumlahnya 78000 pasukan di sentra ekonomi dan pemerintahan ditarik kecuali pasukan yang posisinya di sekitar monas tetap di siaga kan, selain ditutup dan dijaga dengan pagar kawat berduri jalan-jalan menuju monas dijaga pula berbagai pasukan, mobil lapis baja dan tank, di sekitar cendana, penjagaan lebih ketat lagi, tidak ada aliran masa menuju monas, mungkin karena ada seruan dari Amien Rais agar masa tidak menuju monas mereka pun tidak monas, namun menurut berbagai sumber yang dihubungi larangan untuk tidak pergi ke monas ditujukan kepada masyarakat umum, sebaliknya para mahasiswa yang berkumpul di senayan bertambah banyak sehingga jalan di depan gedung mpr mata total,

konsentrasi massa memang hanya terjadi di halaman dan Gedung MPR atau DPR, tampaknya petugas yang melakukan penjagaan tidak mengizinkan para mahasiswa ke luar halaman (Makka, 2014).

Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi para pebisnis keturunan Tionghoa, yang membutuhkan waktu bervariasi untuk memulihkan usaha mereka, tergantung kondisi keuangan dan kerusakan toko masing-masing. Proses pemulihan usaha, yang memakan waktu antara 3 hari hingga satu bulan, dipengaruhi oleh pertimbangan keuangan dan keamanan, mengingat situasi yang belum sepenuhnya stabil dan potensi terjadinya kerusuhan susulan.

Sebagian besar pebisnis keturunan Tionghoa memilih bertahan dan membangun kembali usaha mereka di Jakarta, meskipun belum ada penyelesaian hukum yang tuntas terkait pelanggaran HAM pasca kerusuhan. Mereka beranggapan bahwa identitas mereka sebagai keturunan Tionghoa akan tetap terlihat di mana pun mereka berada, sehingga perpindahan tempat tinggal, selain pertimbangan lokasi usaha, tidak terlalu berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan mereka.

Tindakan yang diambil oleh para pebisnis keturunan Tionghoa dalam memulai kembali usaha dagangnya dari bawah adalah dengan menggunakan uang hasil pinjaman maupun tabungan selama berdagang. Alasan kuat yang menjadi landasan pengusaha Tionghoa memilih tetap bertahan adalah letak lokasi Jakarta yang menguntungkan dan jalan utama penghubung antar wilayah di Jakarta, Keyakinan akan pasar yang terus berkembang, diiringi kerja keras dan keuletan, memungkinkan para pebisnis keturunan Tionghoa di Jakarta membangun kembali dan mengembangkan usaha mereka. Hingga tahun 2003, mereka telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dan berperan penting dalam sektor ritel dan otomotif, membuktikan ketangguhan dan dedikasi mereka dalam berbisnis meskipun pernah menjadi korban kerusuhan Mei 1998 (Hutahaeon, 2014).

D. Penyelesaian dan Dampak Pasca-Kerusuhan Mei 1998

Pada 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, Soeharto mengundurkan diri dari kepresidenan di Istana Merdeka, dan B.J. Habibie dilantik sebagai penggantinya. Habibie langsung menghadapi tantangan berat: mengatasi krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Satu jam kemudian, Soeharto secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Habibie di hadapan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 8 UUD 1945, dan Habibie dilantik sebagai Presiden RI oleh Ketua Mahkamah Agung.

Meskipun Soeharto telah menyatakan pengunduran dirinya, demonstrasi mahasiswa di gedung MPR/DPR tetap berlanjut. Di tengah situasi tersebut, Amien Rais mengajak masyarakat untuk menghadiri peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Monas. Pada 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, yang beranggotakan 16 menteri dari berbagai latar belakang, termasuk ABRI, Golkar, PPP, dan PDI (Emita, 2018).

Saat menjabat, Presiden Habibie menghadapi krisis multisektoral di Indonesia yang meliputi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Prioritas pemerintahannya adalah mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk itu, beliau berkolaborasi dengan para menteri kabinet. Di sektor ekonomi, upaya perbaikan meliputi restrukturisasi perbankan, rekonstruksi ekonomi nasional, likuidasi bank-bank bermasalah, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS di bawah Rp10.000, dan implementasi reformasi ekonomi sesuai ketentuan IMF (Klaudia & Wartha, 2020).

Sebagai tokoh kunci Reformasi, Presiden Habibie mendorong transparansi politik di Indonesia dan menginisiasi pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di bawah kepemimpinannya, pemilu yang diselenggarakan benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, beliau membebaskan sejumlah tahanan politik era Soeharto dan mencabut larangan pembentukan serikat buruh independen.

Era kepemimpinan Presiden Habibie menandai era kebebasan berekspresi di ruang publik. Beliau memberikan akses seluas-luasnya bagi

siapa pun untuk menyampaikan pendapat, baik melalui rapat umum maupun demonstrasi. Akan tetapi, demonstrasi tetap memerlukan izin kepolisian dan penetapan lokasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Emita, 2018).

Meskipun demikian, aparat kepolisian kerap menerapkan pasal-pasal hukum yang beragam dalam penanganan demonstrasi. Penanganan pelaku unjuk rasa dengan pasal yang bervariasi dapat dimaklumi karena belum ada aturan hukum yang jelas untuk menangani demonstran. Guna menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan pengesahan undang-undang yang mengatur demonstrasi, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menjelang berakhirnya kerusuhan, beredar kabar mengenai potensi serangan terhadap pemukiman warga. Kabar ini terbagi dua: kemungkinan aksi balasan dari warga keturunan Tionghoa, dan kemungkinan serangan atau kedatangan kelompok perusuh ke permukiman. Penyebaran kedua kabar ini pun berbeda; kabar pertama lebih banyak beredar di daerah dengan populasi warga keturunan Tionghoa yang signifikan, sedangkan kabar kedua lebih dominan di wilayah lainnya (Ester, 1998).

Imbauan aparat keamanan untuk meningkatkan keamanan lingkungan beriringan dengan munculnya isu-isu meresahkan. Hal ini mendorong warga di berbagai wilayah untuk melaksanakan ronda malam selama beberapa waktu. Meskipun imbauan tersebut datang terlambat, inisiatif warga terbukti efektif dalam memulihkan keamanan. Namun, selama periode ronda (sekitar satu hingga dua minggu), isu-isu yang disebar melalui telepon atau individu tertentu sempat menimbulkan kecurigaan dan ketegangan di masyarakat.

Gerakan reformasi tidak hanya memengaruhi ranah politik, tetapi juga membawa dampak signifikan pada aspek sosial, di mana pada masa itu, masyarakat Indonesia seolah kehilangan kemanusiaan. Peristiwa penjarahan, pembakaran, dan pemerkosaan yang terjadi merupakan manifestasi dampak sosial yang sangat besar. Insiden-insiden ini

memperburuk hubungan antara masyarakat pribumi dan keturunan Tionghoa, mengingat mayoritas korban penjarahan adalah warga Tionghoa (Sirot & Atmaja, 2020).

Kesimpulan

Kerusuhan Mei 1998 merupakan puncak dari krisis ekonomi yang diperparah oleh berbagai musibah nasional dan sentimen rasial terhadap etnis Tionghoa yang telah berlangsung sejak Juli 1997. Krisis moneter menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi dan anjloknya nilai tukar rupiah secara drastis. Sentimen anti-Tionghoa diekspresikan dalam berbagai tindakan kekerasan seperti makian, perusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Banyak kawasan bisnis dan permukiman etnis Tionghoa menjadi sasaran tanpa adanya intervensi aparat keamanan. Bahkan, beberapa toko memasang tulisan “milik pribumi” atau “milik muslim” sebagai upaya perlindungan.

Kronologi kerusuhan di Jakarta dimulai dengan tragedi penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, yang memicu ketegangan dan meluasnya demonstrasi mahasiswa. Aksi kerusuhan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Jakarta, ditandai dengan pembakaran dan penjarahan, dengan keberadaan provokator yang teridentifikasi. Meskipun mahasiswa menolak ajakan untuk keluar dari kampus, kelompok provokator tetap melakukan perusakan di luar kampus.

Pasca-kerusuhan, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menduduki Gedung MPR/DPR, menuntut reformasi total dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Masa pemerintahan Habibie berupaya mengatasi krisis ekonomi dan politik dengan merekapitulasi perbankan, merekonstruksi ekonomi, dan menaikkan nilai tukar rupiah. Di bidang politik, Habibie mengupayakan transparansi, merencanakan pemilu demokratis, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan serikat buruh independen. Beliau juga memberikan kebebasan berpendapat di muka umum, yang kemudian diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

Meskipun kerusuhan menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha etnis Tionghoa, banyak dari mereka memilih untuk tetap bertahan dan membangun kembali usaha mereka, menunjukkan ketangguhan dan keyakinan akan potensi ekonomi Jakarta. Setelah kerusuhan, isu-isu penyerangan balasan dan kedatangan perusuh sempat menyebar, mendorong warga untuk melakukan ronda malam sebagai upaya pemulihan keamanan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Dewi. (2014). *Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan*. Kompas Media Nusantara.
- Blackburn, Susan. (2011). *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Masup Jakarta.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology; In qualitative research in psychology. *Uwe Bristol*, 3(2), 77–101.
- Distiana, Emita. (2018). *Masa Reformasi*. Derwati Press.
- Febriyanti, D. (2016). Signifikansi Surat Kabar Kompas Dalam Pemberitaan Peristiwa Reformasi 98. *Avatara*, 4(3), 1156–1170.
- Gintings, Sutradara. (2006). *Jalan terjal menuju demokrasi*. Institute for
- H. Agus Rustamana, Putry Maharani Adillah, & Zamin Zatu. (2023). 1998 Reform Movement. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 2(6), 543–562. <https://doi.org/10.55927/esa.v2i6.6880>
- Hadikoemoro, Soekisno. (1998). *Tragedi Trisakti 12 Mei 1998*. Universitas Trisakti.
- Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemeriksaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*, 2(2), 337. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.76>
- Hutahaean, J. (2014). Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003. *Journal of Indonesian History*, 3(1), 27–33.
- Jusuf, Ester. I., dkk. (2006). *Kerusuhan Mei 1998: Fakta, Data dan Analisa*.
- Klaudia, M. W., & Wartha, I. B. N. (2020). Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999.

Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP), 10(1), 69–75.
<https://doi.org/10.36733/jsp.v10i1.699>

Makka, A. M. (2014). *Siapa Mengkhianati Pak Harto?*. Imania.

Policy dan Community Development Studies (IPCOS).

Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9.
<https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>

Pratama, Rinaldo. A., & Perdana, Y. (2022). *Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi*. Lakeisha.

Rahayu, A. R. (2024). Kerusuhan Mei 1998: Tragedi Etnis Tionghoa di Jakarta. *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2), 104–115.
<https://doi.org/10.31258/hjps.3.2.104-115>

Sia, K. S. (2005). Etnis Tionghoa Kristen Paska Kerusuhan Mei 1998. *Theologia Alethia*, 8(15), 45–98.

Sirot, I., & Atmaja, T. H. (2020). Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 100–107.

Solidaritas Nusa Bangsa, Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Tarmidi, L. T. (2003). Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran Imf Dan Saran. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(4), 1–25.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.